



# Defisit APBD Diperkirakan Capai Rp202 Miliar

## ▶ Kegiatan Fisik Pemda Diusulkan Tak Dilaksanakan



**Joni Yusman**  
Ketua Fraksi PAN

**Dulu sebenarnya DAK harusnya tidak masuk dalam pembayaran hutang, kalau pemerintah langsung menyetop pekerjaan. Tapi justru dipaksa sehingga masuk dalam hutang APBD.**

**NANGA PINOH, SP** – Defisit APBD Melawi tahun anggaran 2018 berpotensi memecahkan rekor sejak Melawi berdiri. Dalam rapat kerja antara DPRD dan Pemkab Melawi di Ruang Paripurna DPRD Melawi, Senin (17/9), terungkap nilai defisit hingga Rp202 miliar bila seluruh belanja dalam APBD 2018 direalisasikan.

Besaran angka defisit ini, merupakan asumsi APBD Melawi 2018 bila seluruh belanja dijalankan pemerintah. Diketahui

hingga kini hampir seluruh proyek fisik seperti paket-paket Penunjukan Langsung (PL) ditunda pelaksanaannya. Begitu juga dengan beberapa proyek besar seperti pembangunan tiga jembatan rangka baja yang hingga saat ini belum berjalan.

Anggota DPRD Melawi, Malin menilai persoalan APBD Melawi tak kunjung selesai sejak ditetapkan pada akhir November lalu, hingga

pertengahan September ini.

“Angka tekor ini bahkan disebutkan bisa sampai Rp202 miliar. Nah, ini kok berubah-ubah, kemarin dalam rapat-rapat sebelumnya disebutkan sebesar Rp165 miliar, kemudian Rp154 miliar. Padahal awal penetapan disebut APBD kita *balance*, kemudian setelah asistensi naik jadi Rp31 miliar,” keluhnya.

Malin pun meminta Pemkab Melawi merincikan penyebab defisit APBD yang begitu besar. Berapa total belanja langsung dan tak langsung, realisasi saat ini, serta target pendapatan daerah dan realisasinya saat ini.

“Saran konkrit saya sampaikan, supaya semua kegiatan fisik tidak usah dilaksanakan. Kita *restart* ulang saja. Laksanakan belanja rutin saja seperti gaji pegawai dan lain-lain. Daripada pinjam uang ke pihak ketiga, itu sama saja buat masalah baru,” katanya.

Kritikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini pun berlanjut. Dimana dimasa akhir masa jabatan DPRD Melawi ini, ia tak mau dianggap menjadi bagian yang membuat Melawi ikut kolaps. Menurutnya, persoalan pengelolaan keuangan daerah Melawi ini, sudah sangat luar biasa parah. Namun, justru para pejabatnya masih terlihat santai saja.



“Kita tak usah lagi bicara aspirasi atau ini untuk visi misi siapa. Tunda semua, kalau ada surplus anggaran, itu untuk bahan menyusun APBD 2019. Kalau mau bahas perubahan, sekarang apa yang bisa diubah, kalau APBD juga tak bisa jalan. Apa masih bisa terkejar dengan waktu yang mepet,” kritiknya.

Ketua Fraksi PAN, Joni Yusman mengaku bingung dengan nilai defisit yang sebenarnya dari APBD Melawi. Karena perubahan angka defisit mulai dari zero, naik kemudian menjadi Rp32 miliar, Rp 58miliar kemudian sampai Rp90 miliar, Rp143 miliar sampai kemudian muncul asumsi baru Rp202 miliar.

Ia mempertanyakan belanja apa yang sudah dibuat. Lalu, apa saja yang masuk dalam pembavaran

hutang.

“Dulu sebenarnya DAK harusnya tidak masuk dalam pembayaran hutang, kalau pemerintah langsung menyetop pekerjaan. Tapi justru dipaksa sehingga masuk dalam hutang APBD,” katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Melawi, Andri Suparto menerangkan, defisit yang sudah dihitung oleh instansinya sebenarnya mencapai Rp142,9 miliar. Defisit muncul karena belanja APBD ditambah dengan pembayaran hutang pihak ketiga yang mesti dilunasi pada tahun ini.

Ia juga menawarkan solusi untuk menutupi defisit tersebut, yakni dengan menunda belanja fisik sebesar nilai defisit

atau mengajukan pinjaman daerah pada Bank Kalbar. Yang tentunya juga harus melalui persetujuan menteri keuangan.

“Belanja fisik yang ditunda akan dimasukkan dalam APBD 2019. Sementara kalau pinjaman ke Bank Kalbar hanya bisa maksimal Rp41 miliar,” katanya.

Terkait usulan beberapa anggota DPRD untuk menghentikan seluruh kegiatan fisik 2018, Andri mengatakan, pihaknya belum bisa memutuskan karena mesti melaporkan hasil rapat ini pada Bupati Melawi.

“Kami juga masih menghitung riil pendapatan. Karena memang tidak bisa valid 100 persen. Kalau memang belanja fisik nanti diputuskan ditunda, kami siap untuk melaksanakannya,” katanya. **(eko/lis)**



SUARA PEMRED/ ENO SUSILO  
**RAPAT KERIA** - Rapat Keria DPRD dan Pemkab Melawi terkait realisasi APBD Melawi hingga persoalan potensi defisit yang diperkirakan bisa mencapai Rp202 miliar.